



Ribuan Surat Suara Tak Sah Dibawa ke MK

Imam-Fadli Resmi Ajukan Gugatan Perselisihan Hasil Pilwali

YOGYAKARTA – Kubu pasangan calon (paslon) wali kota-wakil wali kota Yogyakarta nomor urut 1 Imam Priyono-Achmad Fadli resmi mendaftarkan gugatan perselisihan hasil Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Yogyakarta 2017 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Materi gugatan yang didaftarkan salah satunya mengenai jumlah surat suara tidak sah yang mencapai 14.355 suara. Gugatan didaftarkan Tim Pemenangan Imam-Fadli dan Badan Pemenangan Pemilu (Bapil) DPC PDIP Kota Yogyakarta didampingi tim advokasi dari DPP PDIP. Imam-Fadli juga turut ke Jakarta bersama rombongan, tetapi tak ikut ke MK melainkan hanya bertandang ke Kantor DPP PDIP.

Saat dihubungi wartawan, Imam Priyono optimistis gugatannya akan diproses MK. Keyakinannya itu berbekal catatan Tim Pemenangan yang menemukan bukti adanya tin-

dak kecurangan selama penyelenggaraan Pilwali Yogyakarta 2017. "Ada bukti kuat yang sudah dikumpulkan tim," tandasnya kemarin.

Petahana yang pada periode 2011-2016 menjabat sebagai wakil wali kota Yogyakarta itu juga angkat bicara soal sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta yang tak mau membuka seluruh surat suara tidak sah saat proses rekapitulasi lalu. Pembukaan hanya dilakukan terhadap beberapa surat suara saja, itu pun hanya *sampling*.

Menurutnya sikap tersebut justru menimbulkan pertanyaan di publik atas adanya indikasi tidak transparannya

penyelenggara Pilwali Yogyakarta 2017. "Banyak juga masyarakat yang bertanya langsung kesaya. Makanya gugatan ini kami ajukan bukan soal menang atau kalah, tapi lebih pada upaya pendidikan politik dan berdemokrasi bagi masyarakat," tandasnya.

Ketua Tim Pemenangan Imam-Fadli, Danang Rudi yamoko, menambahkan, saat mendaftarkan gugatan ke MK, pihaknya membawa dokumen sebagai pelengkap bukti formil dan materiil sekitar 300 lembar. Banyaknya alat bukti yang diperoleh semakin menambah rasa optimisme gugatan akan dikabulkan MK.

"Ada banyak data pendukung yang turut kami sampaikan, termasuk semua hasil rekapitulasi berjenjang sehingga cukup tebal," jelasnya.

Materi gugatan selain mempertanyakan banyaknya surat suara tidak sah, menurut Danang, juga menyangkut adanya perbedaan tafsir di tingkat penyelenggara serta dokumen

kependudukan pemilih yang tidak terdata.

Namun yang menjadi sorotan utama, lanjutnya, adalah surat suara tidak sah yang naik 400 kali lipat dari jumlah suara tidak sah pada Pilpres 2014 yang hanya sekitar 3.400 suara. "Ini juga sudah menjadi sorotan nasional, kok bisa di Kota Yogya suara tidak sahnya mencapai belasan ribu. Dari sini kami menilai ada dugaan kecurangan yang terstruktur," sebut Ketua DPC PDIP Kota Yogyakarta itu.

Terpisah, kubu paslon nomor urut 2 Haryadi Suyuti-Herroe Poerwadi menghormati langkah rivalnya yang memutuskan menempuh gugatan ke MK. Di sisi lain mereka menilai dinamika politik dalam demokrasi adalah hal yang wajar. "Adanya dinamika itu kita pahami. Yang jelas semua proses mulai dari TPS, PPK hingga kemarin di KPU berjalan dengan baik, semua patut kita syukuri," kata Haryadi.

ristu hanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 11 Februari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005